

**PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK DI SEKOLAH DALAM
MENINGKATKAN KESADARAN POLITIK SISWA**

Wildan Nurul Fajar

Pendidikan Kewarganegaraan FKIP
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ABSTRACT

The study was based on concerns about the condition of the political dynamics in Indonesia, particularly in relation to the political awareness of the young generation is minimal gain in political education. This research aims to know how the implementation of political education in schools to increase the political consciousness of students. This study used a qualitative approach and descriptive methods of analysis. Data and information gathering techniques used include the study of documentation, interviews, and observations. The results showed that the school as an important component of education, can basically be used as a medium of political education to inculcate and establish the nation's growing political awareness generation, through various forms of educational programs through both political education, student council and extracurricular activities as well as other forms of activities planned incidental or intending to provide political information to students.

Keywords: Civic Education, political education, political awareness

ABSTRAK

Penelitian ini bertolak dari kondisi keprihatinan mengenai dinamika politik yang terjadi secara umum di Indonesia, terutama berkaitan dengan kesadaran politik generasi muda bangsa yang minim memperoleh pendidikan politik. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan pendidikan politik di sekolah dalam meningkatkan kesadaran politik siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah sebagai komponen terpenting pendidikan pada dasarnya dapat dijadikan media pendidikan politik

untuk menanamkan kesadaran politik generasi bangsa melalui berbagai macam bentuk program pendidikan politik baik melalui mata pelajaran PKn, kegiatan OSIS, ekstrakurikuler, maupun bentuk kegiatan lain yang terencana ataupun yang bersifat insidental yang bermaksud untuk memberikan informasi politik kepada siswa.

Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, pendidikan politik, kesadaran politik

PENDAHULUAN

Keberadaan siswa sebagai bagian yang tak terpisahkan dari generasi muda saat ini memiliki andil yang cukup besar dalam menentukan laju pemerintahan. Para siswa tersebut dapat dikatakan sebagai tulang punggung negara karena di pundak merekalah masa depan bangsa ini akan digantungkan.

Usia SMA merupakan usia yang dikatakan masih labil. Tetapi pada usia ini masa-masa yang paling menentukan dalam proses pendidikan seorang individu karena dalam usia ini ia mencoba menyerap berbagai konsep keilmuan dan mengaplikasikannya secara langsung dalam masyarakat. Dalam usia tersebut, seorang individu sedang berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengembangkan berbagai aspek yang ia miliki, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotornya. Oleh karena itu, pada usia ini sangat mudah untuk menanamkan konsep tentang berbagai hal yang baru. Konsep yang diserap tersebut termasuk juga didalamnya adalah berbagai konsep mengenai politik. Hal ini menjadi penting agar kelak mereka tidak buta politik dan menjadi sasaran pembodohan politik, karena pada dasarnya usia SMA ini merupakan jumlah yang menjanjikan untuk dijadikan sebagai target untuk mendulang suara dari pemilih pemula dalam sebuah kegiatan politik seperti Pemilu. Maka dari itu sangatlah relevan dunia pendidikan bisa menjadi basis yang strategis untuk menaikkan pamor politik. Tak heran jika para caleg berupaya meraih simpati dari kalangan siswa.

Sejatinya sudah ada larangan beraktifitas politik atau berkampanye di lembaga pendidikan. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2008. Namun dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan, para pelaku politik praktis ini tetap melakukan aktifitas politik di lingkungan sekolah meski dengan secara terselubung. Bagaimanapun bentuknya, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, kampanye politik merupakan bentuk paparan yang telah mengarah pada politik praktis. Dengan paparan dan ancaman propaganda politik yang semakin besar ini generasi muda harus dibekali moral dan pengetahuan yang baik tentang politik.

Selama menuntut ilmu di bangku pendidikan, para siswa tampaknya tak pernah mendapatkan pendidikan politik secara benar. Pembelajaran politik secara langsung di tengah-tengah kehidupan masyarakat melalui media dapat dikatakan jauh dari pendidikan politik yang ideal. Penanaman konsep politik pada usia SMA sangat penting agar mereka tidak mendapat konsep yang salah dan keliru tentang politik. Pentingnya pendidikan politik pada masa remaja sangat menentukan tingginya tingkat kesadaran politik seseorang. Semakin awal seorang individu mendapat pembelajaran tentang politik maka semakin tinggi kesadarannya untuk mau berpartisipasi langsung dan mampu untuk mengemban tanggung jawab sebagai warga negara yang baik.

David Easton (Sirozi, 2005: 49) mengatakan bahwa 'salah satu kondisi fundamental untuk mempertahankan suatu sistem politik adalah bahwa ketika generasi muda dalam suatu masyarakat menginjak dewasa, mereka harus menguasai ilmu pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap sebagaimana diharapkan oleh para anggota dan sistem yang ada'. Berdasarkan pendapat David Easton tersebut, terlepas dari apakah sistem politik negara tersebut baik atau buruk, jika sistem tersebut ingin tetap berlanjut, maka dalam artian luas sistem tersebut harus mampu mendidik anggota masyarakatnya, terutama generasi muda untuk memainkan peran-peran tertentu yang diharapkan dari mereka.

Pendidikan politik memegang peranan penting untuk dapat mendidik generasi muda agar mendapat pemahaman yang jelas terhadap berbagai konsep dan simbol politik, terutama dalam membentuk kesadaran politiknya. Pendidikan politik menjadi sarana bagi para pemuda untuk mematangkan pemahamannya terhadap orientasi politik fundamental yang mesti dimiliki untuk dapat

membentuk kesadaran politik yang tinggi. Kesadaran politik yang dimiliki seseorang tidak datang dengan sendirinya namun melalui proses yang panjang. Walaupun keluarga, media massa, dan pengalaman politik turut menentukan proses pembentukan kesadaran politik seseorang, namun peranan lembaga-lembaga pendidikan pun tidak bisa dikesampingkan. Proses tersebut dapat diperoleh melalui berbagai jalur pendidikan baik itu jalur formal maupun jalur informal. Dalam jalur formal, yaitu melalui jalur persekolahan, seorang individu dapat lebih mudah mengenal dan mengetahui konsep-konsep tentang politik karena telah direncanakan dan telah disusun secara terperinci melalui kurikulum yang ada.

Kurikulum di persekolahan sebagai komponen terpenting pendidikan, pada dasarnya dapat dijadikan media pendidikan politik untuk menanamkan dan membentuk tumbuhnya kesadaran politik. Hal ini didasarkan dari sumber utama pembuatan kurikulum di lembaga pendidikan tersebut. Sudijono Sastroatmodjo (1995: 27) memberikan komentarnya mengenai hubungan pendidikan dengan tingkat kesadaran politik seseorang sebagai berikut:

Tingkat pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesadaran politik. Makin tinggi tingkat pendidikan masyarakat menjadi makin tinggi kesadaran politiknya. Demikian sebaliknya, semakin rendah tingkat pendidikan masyarakat maka makin rendah pula tingkat kesadaran politik masyarakat.

Siswa mendapat pengetahuan dan pemahaman politik di sekolah melalui pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Memang dapat dikatakan bahwa semua mata pelajaran memiliki tujuan yang baik yaitu mendidik siswanya agar dapat menjadi warga negara sesuai harapan. Namun pada dasarnya mata pelajaran yang secara khusus mendidik siswa untuk menjadi warga negara yang baik (*to be good citizenship*) dibebankan kepada Pendidikan Kewarganegaraan karena materi yang termuat didalamnya banyak mengangkat tentang politik. Sekolah dengan berbagai perangkatnya antara lain kurikulum, buku-buku teks, metode pengajaran, organisasi-organisasi yang ada di sekolah, lingkungan kelas, siswa, guru, struktur administrasi dan lain-lainnya, dapat secara eksplisit maupun implisit terkait dengan transisi orientasi politik fundamental. Orientasi politik fundamental

biasanya terbentuk pada usia dini. Orientasi politik yang terbentuk pada usia tersebut akan berakar sangat kuat dan terus berlanjut sepanjang hayat, terkecuali jika terdapat lingkungan sangat kuat yang mempengaruhi individu tersebut.

Aspek kesadaran politik bukan hanya meliputi aspek kognitif saja namun juga harus melibatkan aspek afektif dan aspek psikomotor. Oleh karena itu, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dianggap tepat karena secara langsung mampu memberikan fasilitas yang lengkap bagi siswa untuk dapat mengembangkan ketiga aspek tersebut dalam memahami berbagai konsep tentang politik.

Agar penelitian ini mencapai sasaran sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka penulis merasa perlu untuk merumuskan apa yang menjadi masalah dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka yang menjadi masalah pada penelitian ini adalah: “bagaimana pelaksanaan pendidikan politik dalam meningkatkan kesadaran politik siswa SMA”. Secara umum tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk memperoleh gambaran secara faktual mengenai pelaksanaan pendidikan politik oleh sekolah dan implikasinya terhadap kesadaran politik siswa. Sementara itu secara khusus tujuan penelitian ini yaitu: mengidentifikasi dan mengkaji realitas pendidikan politik yang dilaksanakan oleh sekolah dalam meningkatkan kesadaran politik siswa; mengetahui peran sekolah dalam pelaksanaan pendidikan politik bagi terbentuknya kesadaran politik siswa; dan mengetahui proses pendidikan politik yang dilaksanakan oleh sekolah terhadap para siswanya dipahami dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan keadaan yang terjadi pada saat peneliti melakukan penelitian. Melalui metode ini data yang diperlukan diklasifikasikan, dan disusun untuk memperoleh gambaran masalah pada saat penelitian dilakukan. Sementara pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan

lainnya, melainkan lebih menekankan kepada kajian interpretatif (Strauss dan Corbin, 2009:4).

Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data kualitatif, yang meliputi studi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Terkait dengan penentuan subjek dalam penelitian ini, ada beberapa kriteria yang digunakan dalam penetapan subjek penelitian, yakni latar (*setting*), para pelaku (*actors*), peristiwa-peristiwa (*events*), dan proses (*process*) (Miles dan Huberman, 2007:57). Kriteria pertama adalah latar, yang dimaksud adalah situasi dan tempat berlangsungnya proses pengumpulan data. Sementara untuk melakukan pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara terhadap narasumber, tidak menutup kemungkinan bahwa tempatnya disesuaikan dengan keinginan narasumber yang bersangkutan. Kriteria kedua, pelaku, yang dimaksud adalah siswa, guru dan kepala sekolah, dan pakar yang berlatar keilmuan terkait dengan Pendidikan Kewarganegaraan serta banyak menaruh perhatian yang tinggi terhadap pendidikan politik. Kriteria ketiga adalah peristiwa, yang dimaksud adalah pandangan, pendapat dan penilaian tentang pendidikan politik dalam menciptakan kesadaran politik siswa, baik yang disampaikan secara individual baik dalam kegiatan pertemuan, seminar atau lokakarya. Kriteria keempat yaitu proses, yang dimaksud adalah peneliti melakukan wawancara dengan subjek penelitian berkenaan dengan pandangannya terhadap fokus masalah dalam penelitian ini. Sementara analisis data terhadap transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang terkumpul menggunakan analisis data induktif. Analisis data tersebut mengacu pada langkah-langkah yang dipakai oleh Miles dan Huberman (2007:16-19) yang terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Realitas Pelaksanaan Pendidikan Politik di Sekolah

Sekolah dalam realitasnya selain mengutamakan keagamaan juga mengutamakan pendidikan secara keseluruhan. Salah satunya adalah pendidikan

politik yang diberikan oleh pihak sekolah kepada siswa melalui materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Pendidikan politik yang ada di sekolah selain diperoleh dari materi pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, juga dapat diperoleh melalui berbagai bentuk kegiatan, yaitu: kegiatan upacara bendera ini dilaksanakan pada hari senin, sebagai suatu wahana membentuk rasa nasionalisme dan kedisiplinan siswa; kegiatan ekstrakurikuler yang meliputi berbagai macam bidang, diantaranya Pramuka, PMR maupun kegiatan ekstrakurikuler lainnya; melalui Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) atau dalam lingkungan sekolah Muhammadiyah lebih dikenal dengan IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah), maupun bentuk lainnya yang berusaha menyampaikan informasi politik, semisal melalui pemasangan potongan koran pada papan informasi atau majalah dinding atau juga kegiatan lainnya yang sifatnya insidental seperti sosialisasi pemilu ketika akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah.

B. Bentuk-Bentuk Pendidikan Politik di Sekolah

Berdasarkan hasil observasi, studi dokumentasi maupun wawancara yang dilakukan didapat data maupun keterangan mengenai bentuk-bentuk pendidikan politik di sekolah antara lain sebagai berikut:

1. Pembelajaran PKn

Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sangat penting dalam meningkatkan kesadaran politik siswa, karena jika didasarkan pada tujuannya, PKn atau dalam istilah lain lebih dikenal sebagai *civic education* mempunyai fungsi dan peran sebagai pendidikan politik. Dalam kurikulum PKn terdapat beberapa materi politik yang nantinya dengan penyampaian materi politik tersebut diharapkan akan memberikan pemahaman kepada siswa mengenai informasi politik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran politik siswa dan lebih jauhnya akan dapat mendorong siswa untuk ikut berperan serta dalam kegiatan politik dalam lingkup kecil seperti di sekolah maupun dalam lingkup yang lebih luas yaitu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di sekolah pelaksanaan pendidikan politik utamanya dilakukan melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan maupun melalui program kegiatan lainnya.

Dalam mata pelajaran PKn terdapat materi-materi yang merupakan wujud dari pelaksanaan pendidikan politik. Pada tingkatan SMA khususnya di Kelas X terdapat materi mengenai hakikat Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ada pula materi menghargai persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan dan materi sistem politik di Indonesia. Pada Kelas XI terdapat materi budaya politik di Indonesia, dan di Kelas XII terdapat materi berbagai sistem pemerintahan. Hadirnya materi politik di dalam mata pelajaran PKn berperan penting dalam menambah wawasan terkait dengan pengetahuan politik siswa.

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari pembelajaran PKn, Guru dalam menyampaikan materi politik selalu berpedoman pada sumber belajar yang relevan dan selalu di *update* informasinya setiap saat berdasarkan kondisi dan isu yang terjadi saat itu. Diharapkan dengan sumber belajar tersebut siswa akan lebih mudah memahami dan mengerti tentang materi politik terutama sekali siswa mendapat materi yang aktual berdasarkan konteks yang terjadi saat itu.

Tidak hanya memaksimalkan pembelajaran politik dengan pemanfaatan sumber belajar saja, Guru dalam mengajarpun sudah menggunakan metode dan model pembelajaran yang menyenangkan dan partisipatif. Penggunaan metode dan model pembelajaran tersebut dilakukan dengan pertimbangan agar siswa menjadi tertarik terhadap pelajaran dan akhirnya dapat berpartisipasi dalam pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran Guru sudah merancang suatu bentuk pembelajaran yang tidak hanya dilakukan didalam kelas saja, tetapi juga dapat memfasilitasi pembelajaran PKn di luar kelas. Dengan pembelajaran di luar kelas siswa belajar mempraktekkan langsung teori yang didapat ketika pembelajaran dilakukan didalam kelas. Praktek tersebut bisa dilakukan dalam bentuk simulasi. Dengan melakukan simulasi siswa akan lebih faham dan menjadi lebih mengerti tentang materi yang diberikan.

2. Program Kesiswaan

Pelaksanaan pendidikan politik di sekolah selain melalui mata pelajaran PKn juga dilakukan melalui program yang dibuat oleh bagian kesiswaan. Program kesiswaan yang ada sekolah diantaranya adalah program pengembangan diri

melalui ekstra kurikuler, satuan tugas pelaksanaan kesiswaan, tata tertib dan disiplin, program sosialisasi dan program pembinaan OSIS. Yang amat sangat terkait dengan program pendidikan politik yaitu, program pembinaan OSIS dan kegiatan ekstra kulikuler. Dalam kegiatan OSIS yang menjadi poin penting pelaksanaan pendidikan politik yaitu bagaimana siswa belajar untuk berorganisasi.

Adanya pembinaan OSIS yang dilaksanakan oleh pihak kesiswaan, telah menjadi bukti bahwa sekolah telah melaksanakan kegiatan dalam pendidikan politik di sekolah untuk siswanya. Pembinaan yang dilaksanakan terhadap OSIS akan memberikan mereka pengetahuan dan pengalaman mengenai kepemimpinan dan bagaimana cara menjalankan roda organisasi. Organisasi OSIS akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan serta dalam kegiatan politik di sekolah.

Dalam kegiatan OSIS, ada beberapa hal yang menjadi bagian penting dari proses pendidikan politik yaitu adanya pemilihan OSIS secara langsung oleh warga sekolah yang dilaksanakan rutin setahun sekali dan kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) yang bertujuan memberikan keterampilan kepemimpinan bagi siswa calon pengurus OSIS.

PEMBAHASAN

Dalam menjalankan dan mengoptimalkan proses pendidikan politik maka perlu strategi dan tempat yang tepat di mana pendidikan politik itu dilaksanakan. Salah satu yang dapat dijadikan sebagai sarana atau tempat pelaksanaan pendidikan politik adalah sekolah. Sekolah merupakan suatu wahana untuk pendidikan politik yang mengarah pada tujuan agar siswa menjadi insan yang melek politik. Pendidikan politik terkait dengan konsep dimana individu-individu dapat memperoleh pengetahuan, sikap dan nilai-nilai tentang sistem politik masyarakat, umumnya negara. Maka diperlukan kerjasama berbagai pihak untuk menciptakan sekolah sebagai laboratorium pendidikan politik.

Sekolah merupakan suatu lembaga pendidikan politik formal yang mempunyai peran dalam pelaksanaan pendidikan politik. Pendidikan politik di sekolah dapat diperoleh melalui pembelajaran formal di kelas melalui teori-teori

yang diajarkan oleh guru dan praktek secara langsung ataupun secara tidak langsung.

Dalam pembelajaran formal, sekolah juga memfasilitasi pendidikan politik melalui kurikulum. Walaupun tidak secara langsung disebutkan mata pelajaran pendidikan politik, tetapi muatan pendidikan politik tertuang dalam mata pelajaran pendidikan Kewarganegaraan yang menjadi alternatif pelaksanaan pendidikan politik di sekolah. Untuk terciptanya pelaksanaan pendidikan politik yang kondusif, maka peran sekolah sangatlah penting. Tetapi peran ini pun perlu didukung oleh peran serta dari semua elemen dan warga sekolah. Selain menerapkan pendidikan politik dalam bentuk kurikulum, baik yang didesain khusus dalam PKn, maupun secara khusus dimana politik diberikan dalam mata pelajaran lain, bentuk kegiatan yang dapat difasilitasi oleh sekolah yang berhubungan dengan proses pendidikan politik diantaranya adalah Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) maupun kegiatan ekstrakurikuler seperti paskibra, pramuka ataupun PMR.

Melalui bidang kesiswaan, setiap sekolah dapat memberi peran dalam pelaksanaan pendidikan politik. Waka Kesiswaan merupakan wakil Kepala Sekolah yang membantu dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah dalam hal pembinaan OSIS. Pembinaan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, penilaian, pengembangan dan pemberian berbagai bentuk bantuan yang dilakukan oleh pembina OSIS atau sekolah. Tujuan pembinaan tersebut adalah untuk meningkatkan peran serta dan inisiatif para siswa untuk menjaga dan membina sekolah sebagai wiyatamandala sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh yang bertentangan dengan kebudayaan nasional, menumbuhkan daya tangkal pada diri siswa terhadap pengaruh negatif yang datang dari luar maupun dari dalam lingkungan sekolah, meningkatkan apresiasi dan penghayatan seni, menumbuhkan sikap berbangsa dan bernegara, meneruskan dan mengembangkan jiwa, semangat serta nilai-nilai 45, serta meningkatkan kesegaran jasmani dan rohani.

Didalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 226/C/Kep/0/1993 disebutkan bahwa Organisasi Kesiswaan di

sekolah adalah OSIS. Kepanjangan OSIS terdiri dari: Organisasi, Siswa, Intra, Sekolah. Organisasi secara umum adalah kelompok kerjasama antara pribadi yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan lebih dahulu. Organisasi dalam hal ini dimaksudkan sebagai satuan atau kelompok kerjasama para siswa yang dibentuk dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama, yaitu mendukung terwujudnya pembinaan kesiswaan. Yang dimaksud siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sedangkan Intra diartikan sebagai di dalam sekolah dan diantara para siswanya, sehingga OSIS berarti suatu organisasi siswa yang ada didalam dan lingkungan sekolah yang bersangkutan.

OSIS adalah satu-satunya wadah organisasi siswa yang sah di sekolah. Oleh karena itu setiap sekolah wajib membentuk OSIS, yang tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan OSIS disekolah lain yang tidak menjadi bagian/alat dari organisasi lain yang ada diluar sekolah. OSIS sebagai tempat berkelompok siswa dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini OSIS dipandang sebagai sistem, dimana sekumpulan para siswa mengadakan koordinasi dalam upaya menciptakan suatu organisasi yang mampu mencapai tujuan. Oleh karena itu OSIS sebagai suatu sistem ditandai beberapa ciri pokok; berorganisasi pada tujuan, memiliki susunan kehidupan kelompok, memiliki sejumlah peranan, terkoordinasi dan berkelanjutan dalam waktu tertentu.

Salah satu dari ciri pokok suatu organisasi ialah memiliki berbagai macam fungsi dan peranan. Demikian pula OSIS sebagai suatu organisasi memiliki pula beberapa peranan atau fungsi dalam mencapai tujuan. Sebagai salah satu jalur pembinaan kesiswaan, peranan OSIS yaitu sebagai wadah kegiatan para siswa disekolah bersama dengan pembinaan yang lain untuk mendukung tercapainya tujuan pembinaan kesiswaan. Selain itu OSIS berperan sebagai motivator yang menyebabkan lahirnya keinginan semangat para siswa untuk berbuat dan melakukan kegiatan bersama dalam mencapai tujuan. Lebih lanjut OSIS mempunyai peranan yang bersifat preventif dalam arti secara internal OSIS dapat menggerakkan sumber daya yang ada secara eksternal OSIS untuk mampu mengadaptasi dengan lingkungan, seperti menyelesaikan persoalan perilaku

menyimpang siswa dan sebagainya. Dengan demikian secara preventif OSIS berhasil ikut mengamankan sekolah dari segala ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar. Melalui peranan OSIS tersebut dapat ditarik beberapa manfaat yaitu: dapat meningkatkan nilai-nilai ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; meningkatkan kesadaran berbangsa, bernegara dan cinta tanah air; meningkatkan kepribadian dan budi pekerti luhur; meningkatkan kemampuan berorganisasi, pendidikan politik dan kepemimpinan; meningkatkan ketrampilan, kemandirian dan rohani; meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani; dan menghargai dan menjiwai nilai-nilai seni, meningkatkan dan mengembangkan kreasi seni.

Selain pembinaan OSIS, kesiswaan juga dapat melaksanakan program pendidikan politik melalui pembinaan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan diluar jam pelajaran biasa atau pada waktu libur sekolah yang dilakukan baik di sekolah maupun di luar sekolah dengan tujuan untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan siswa mengenal hubungan antara berbagai mata pelajaran, menyalurkan bakat dan minat, serta melengkapi upaya pembinaan manusia seutuhnya. Kegiatan ekstrakurikuler yang dapat memfasilitasi siswa untuk mendapatkan pendidikan politik diantaranya yaitu pramuka, paskibra, ataupun PMR.

Pelaksanaan pendidikan politik di sekolah dapat dilakukan dengan cara lain, semisal dengan membuat suatu kegiatan yang secara langsung memberikan informasi politik kepada siswa seperti dalam bentuk penyuluhan ataupun sosialisasi politik yang mengundang praktisi politik maupun pembicara yang ahli dibidang politik. Selain itu bisa juga pendidikan politik dilakukan melalui bentuk lain yaitu dengan menempelkan informasi politik seperti surat kabar atau majalah yang ditempel di papan pengumuman sekolah ataupun dalam majalah dinding.

Selain ada peran sekolah secara umum, diperlukan juga peran serta guru dalam proses Pendidikan Politik. Adapun tugas guru dalam proses pendidikan politik, yaitu sebagai pemegang dan penyampai nilai-nilai serta pandangan-pandangan tentang pendidikan politik, dan sebagai kreator dan manipulator budaya belajar, karena pada kenyataannya budaya atau kebiasaan belajar anak di kelas secara tidak langsung akan menimbulkan akibat politik.

Dalam pembelajaran pendidikan politik peran guru sangatlah penting, terlebih lagi sebagai seorang guru PKn. Dimana seorang guru PKn harus mampu mengajarkan kepada siswanya tentang pendidikan politik pada saat proses pembelajaran ataupun diluar proses pembelajaran di sekolah tersebut. Misalnya pada proses pembelajaran seorang guru memberikan kesempatan untuk bertanya, mendiskusikan materi dan lain-lain.

KESIMPULAN DAN SARAN

Merujuk pada hasil temuan dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan terdahulu, maka dapat dirumuskan beberapa butir kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pendidikan politik yang dilaksanakan di sekolah kepada siswa yaitu melalui materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Selain itu dapat diperoleh melalui berbagai bentuk kegiatan, yaitu: kegiatan upacara bendera ini dilaksanakan pada hari senin, sebagai suatu wahana membentuk rasa nasionalisme dan kedisiplinan siswa; kegiatan ekstrakurikuler yang meliputi berbagai macam bidang, diantaranya Pramuka, PMR maupun kegiatan ekstrakurikuler lainnya; melalui Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) atau dalam lingkungan sekolah Muhammadiyah lebih dikenal dengan IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah), maupun bentuk lainnya yang berusaha menyampaikan informasi politik melalui pemasangan potongan koran pada papan informasi atau majalah dinding juga kegiatan lainnya yang sifatnya insidental seperti sosialisasi mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.
2. Dalam mengoptimalkan proses pendidikan politik maka perlu tempat yang tepat di mana pendidikan politik itu dilaksanakan. Salah satu yang dapat dijadikan sebagai sarana atau tempat pendidikan politik itu adalah di lingkungan sekolah. Sekolah merupakan suatu wahana untuk pendidikan politik yang mengarah pada tujuan agar siswa menjadi insan yang melek politik (sadar politik). Pendidikan politik terkait dengan konsep dimana individu-individu dapat memperoleh pengetahuan, sikap dan nilai-nilai tentang sistem politik masyarakat, umumnya negara. Maka diperlukan kerjasama

berbagai pihak baik kepala sekolah, bidang kesiswaan maupun gurudan elemen sekolah lainnya untuk menciptakan sekolah sebagai laboratorium pendidikan politik,.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan beberapa saran yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan politik di sekolah. Saran ini adalah sebagai berikut:

1. Perlunya dilakukan proses pendidikan politik di sekolah secara berkesinambungan melalui berbagai bentuk program kegiatan sekolah baik yang secara langsung dimasukan kedalam kurikulum maupun kegiatan keseharian yang terencana maupun yang sifatnya insidental.
2. Pihak sekolah hendaknya membuat kebijakan yang mendukung terhadap terciptanya sekolah sebagai laboratorium pendidikan politik.
3. Untuk memaksimalkan pelaksanaan pendidikan politik di sekolah, maka seluruh elemen sekolah mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru dan pegawai sekolah sampai dengan siswa sekolah itu sendiri diharapkan bahu membahu mendukung program pendidikan politik di sekolah baik yang terencanakan maupun yang sifatnya insidental.

DAFTAR PUSTAKA

Miles, M.B. & Huberman, A. M. 2007. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi dari judul *Qualitative Data Anlysis*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Muhammad Sirozi. 2005. *Politik pendidikan: Dinamika hubungan antara kepentingan kekuasaan dan praktik penyelenggaraan pendidikan*. Raja Grafindo Persada.

Strauss, A. & Corbin, J. 2009. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*. Terjemahan oleh Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien dari judul *Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sudijono Sastroatmodjo. 1995. *Perilaku politik*. Semarang: IKIP Press.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

